

NasDem Deklarasi Usung Immawan-Martanty

WONOSARI (KR) - Mendekati tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Partai NasDem menggelar deklarasi mengusung pasangan Dr Drs H Immawan Wahyudi MH-Dra Martanty Soenar Dewi di kawasan Embung, Nglanggeran, Patuk, Sabtu (29/8). Dalam deklarasi ini, NasDem menargetkan memenangkan Pilkada Gunungkidul. "Partai NasDem akan bekerja keras memenangkan pasangan calon bupati Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi. Harapannya nanti akan mampu memimpin Gunungkidul lebih baik," kata Ketua DPW Parta NasDem H Subardi. Kegiatan dihadiri Dewan Pakar NasDem DIY Dr Ir H Wahyu Purwanto, paslon capub-cawabup Dr



KR-Dedy EW
Deklarasi NasDem mengusung Immawan-Martanty.

H Immawan Wahyudi MH-Dra Martanty Soenar Dewi, Ketua DPD NasDem Gunungkidul Suparjo SIP, anggota Fraksi NasDem DIY-Gunungkidul dan kader relawan. Diungkapkan, selama 10 tahun terakhir ini perkembangan Gunungkidul luar biasa. Karena pariwisata luar biasa, baik wisatawan dalam maupun

luar negeri masuk ke Gunungkidul. Immawan Wahyudi sudah 2 periode menjadi wakil bupati, sehingga merupakan bukti keberhasilan memimpin mendampingi Bupati Hj Badingah SSos. Sementara Immawan Wahyudi menyampaikan dalam Pilkada ini akan berjuang keras untuk dapat menang. (Ded)-f



• Bupati Bersama Dirut PT BDG dan PDAM Tirta Handayani Wonosari

(KR-Dedy EW)

PRESTASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Bupati Raih Top Pembina BUMD Araward 2020

WONOSARI(KR) Di tengah pandemi Covid-19, Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos tetap mengukir prestasi karena mendapatkan penghargaan Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Majalah Top Business yang bekerja sama dengan Lembaga Otonomi Daerah. Bupati dinilai berhasil dalam mengembangkan BUMD menjadi badan usaha yang mampu mendorong kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara PT Bank Daerah Gunungkidul (BDG) meraih bintang 5 Top BUMD, direktornya Dra Rini Widiyati meraih bintang 5 Top CEO BUMD. Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Isnawan Febriyanto SE MM mendapatkan bintang empat CEO BUMD, sementara perusahaannya PDAM Tirta Handayani mendapatkan bintang 4 Top BUMD. "Penghargaan diserahkan di Hotel Sultan Jakarta," kata PLT Asek II Pemkab Gunung Kidul Ir. Eddy Praptono, MSI yang mewakili Bupati ke Jakarta.

Sesampai Gunungkidul, Jumat (28/8) penghargaan disampaikan kepada Bupati Gunungkidul di sebuah rumah makan Kalurahan Logandeng,



• Bupati Bersama Direksi dan Pengawas PT BDG Gunungkidul

(KR-Endar Widodo)

Kapanewon Playen. Ikut serta dalam acara tersebut Direktur Utama PT BDG Dra Rini Widiyati, Direktur Suci Sulistyawati SH, Direktur Kepatuhan Yustika Ari Sukapti SE dan beberapa pejabat lain. Hadir Direktur Utama PDAM Isnawan Febriyanto SE MM, Direktur Umum Kristina Tri Andarawati SE, Kabag Humas Putro Sapto Wahyono SIP M, Sekretaris Kominfo Joko Hardiyanto SP MEng, Kabid IKP Supriyanto SE MT dan sejumlah pejabat lainnya. Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos bersyukur di tengah kondisi yang sulit dan berperang dengan Virus Korona, usaha untuk mengembangkan BUMD

tertetap berjalan dan meraih prestasi. BPR BDG sekarang berubah status menjadi PT BDG Gunungkidul.

Sementara PDAM terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kebutuhan air masyarakat. Kedua BUMD ini memang sangat strategis, PT BDG membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomian, PDAM bekerja untuk pelayanan kebutuhan air," tambahnya.

Penghargaan ini, kata Dra Rini Widiyati juga bertepatan dengan momentum perubahan status dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi PT BDG. Perubahan status ini diharapkan kiproh PT BDG semakin luas jangkauannya, agar mampu memberikan pelayanan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan juga meningkatkan pendapatannya. Nilai aset PT Bank Daerah Gunungkidul mencapai Rp 490 miliar. Tercatat ada 72.205 nasabah tabungan, 7.666 nasabah kredit, dan 1.447 nasabah deposito. Saat ini ada 14 kantor kas, rencananya akan membuka tiga kantor kas lagi di tahun 2021 mendatang. Sementara, kata Isnawan Febriyanto, pihaknya sudah melayani 62 persen dari 144 desa dengan 53.000 pelanggan. (Ewi/Ded)



• Bupati dengan Pengawas dan Direktur PDAM Tirta Handayani

(KR-Dedy EW)

BAMBANG EKA CAHYA DAN KETUA ORI DIY

Pilkada Rawan Penyalahgunaan Anggaran Publik

YOGYA (KR) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan diselenggarakan 9 Desember 2020. Di DIY ada tiga kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada, Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman. Menariknya, ketiga-tiganya akan diisi wajah baru.

Di Kabupaten Bantul ada petahana, di Gunungkidul mempertaruhkan petahana dengan pejabat publik dan di Sleman adalah istri kepala daerah. Kondisi ini membuat rawan terjadi penyalahgunaan anggaran publik. Dana yang semestinya untuk kepentingan masyarakat, bisa saja justru digunakan untuk politik.

"Hal yang paling banyak ditemukan, adalah anggaran publik yang justru dimanfaatkan untuk politik. Termasuk untuk membeli suara rakyat. Ini disebut politik togel atau 'politik gentong babi'," ujar pengamat politik sekaligus dosen Tata Pemerintahan Fisipol UMY Bambang Eka Cahya dalam Forum Diskusi Wartawan DPRD DIY bertema 'Pengawasan Anggaran Pemerintah yang Rawan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada', di Coffee & Resto Turmartani 1918 Yogyakarta, Sabtu (29/8).

Dicontohkan Bambang, bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat, baik secara tunai, barang, pelayanan, maupun aktivitas apa yang dibiayai dengan anggaran negara. Begitu bansos turun di tempat tertentu, maka suaranya pindah. Karena kondisi masyarakat sangat pragmatis. Begitu dikasih bantuan, akan melihat siapa yang memberi dan selanjutnya akan memilih. Karena itu dalam praktik 'politik gentong babi' ini, sangat menguntungkan petahana atau orang-orang yang didukung petahana.

Problem Pilkada di tengah pandemi ini, banyak rakyat susah, bansos meningkat, KPK sudah mendeteksi ada 87 kabupaten/kota yang anggaran bansosnya naik signifikan. Dan setiap menjelang Pilkada, bansos-bansos pasti naik.



Bambang Eka Cahya (kanan) dalam diskusi bersama wartawan DPRD DIY.

KR-Ahik Widyastuti H

"Dalam praktik 'politik gentong babi' ini, ternyata tidak sebatas bansos saja. Tapi hampir semua anggaran publik bisa ditumpang oleh kepentingan politik. Yang paling sederhana saja, sosialisasi program yang dipasangi foto petahana," ungkapnya.

Sayangnya dijelaskan Bambang, di Indonesia tidak ada regulasi resmi yang mengatur tentang anggaran publik untuk kepentingan politik. Termasuk Undang-undang Pemilu Nomor 7/2017. Kalau di negara-negara maju hal itu sudah diatur regulasi, bahwa program kegiatan dengan anggaran publik tidak boleh menampilkan foto diri, citra diri maupun tagline dari yang bersangkutan.

Baik Bawaslu maupun KPU selaku penyelenggara Pemilu tidak dapat berbuat banyak. Keduanya bekerja di bawah undang-undang, sehingga cara kerjanya di bawah tata kelola. Sementara persoalan politik togel yang terjadi saat Pilkada ada di tata kuasa. Imbasnya, kondisi ini tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu maupun KPU hingga DKPP.

Senada diungkapkan Ketua Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY Budhi Masthuri. Menurutnya, penyalahgunaan anggaran publik berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Pilkada. Di era normal saja

potensinya besar, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Modus yang bisa terlihat nyata, munculnya banyak baliho-baliho bernada sosialisasi program pemerintah. Namun dengan foto petahana atau calon yang didukung petahana. Menurutnya itu merupakan tindakan mal-administrasi.

Budhi menekankan bahwa potensi penyalahgunaan bansos di masa pandemi ini tidak hanya bisa dilakukan petahana. Penantang pun bisa melakukannya melalui perangkat-perangkat desa, di mana desa itu adalah pendukung kandidat tersebut. "Kami menerima info di salah satu kabupaten/kota di DIY, ada kades yang kecenderungannya mengakomodasi figur tertentu dengan memberikan bansos untuk orang-orang yang menjadi pendukungnya," tuturnya.

Ditambahkan Budhi, dalam kondisi normal saja potensi penyalahgunaan dana publik besar apalagi di masa pandemi ini.

"Kunjungan dan safari juga mejadi bentuk maladministrasi karena bisa menjadi kampanye terselubung. Termasuk pemberian bansos yang dananya dari negara, namun dimanfaatkan peserta Pilkada untuk kepentingan politik," ujarnya.

(Awh/Bro)-d

TIDAK PATUH PROTOKOL KESEHATAN Kedai Kopi A Dipasangi Spanduk



KR-Widiastuti

Tidak taat protokol kesehatan, petugas memasang spanduk.

NANGGULAN (KR) - Kedai Kopi A di wilayah Kapanewon Girimulyo diduga melanggar Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tataan Kehidupan Baru (Normal) Pada Masa Pandemi Covid-19. Karena itu Operasi Patuh Protokol Kesehatan Covid-19 dalam kegiatannya, Sabtu (29/8), mengambil tindak-

an memasang spanduk dari Dinas Pariwisata Tanda Tempat Usaha yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan (Kawasan Tidak Patuh Protokol Kesehatan).

"Kami menindaklanjuti laporan dari warga masyarakat terkait dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan terutama ditekankan pelanggaran physical distancing (jarak fi-

sik)," kata Kepala Kantor (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kulonprogo Drs Sumiran. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kadinas Pariwisata, Kabag Hukum Setda, serta jajaran Satpol PP, Satbrimob, TNI dan Dishub.

Dikatakan Sumiran, pihaknya sudah delapan kali memberi edukasi terhadap manajer Kopi A. Namun tidak ditindaklanjuti, sehingga diambil keputusan untuk memberikan warning dengan pemasangan spanduk tersebut.

"Penempelan spanduk dilanjut pemantauan. Bila setelah pemasangan spanduk tetap tidak ada niat baik atau perubahan untuk mematuhi protokol kesehatan, maka usaha akan kami tutup," tandas Sumiran. (Wid)-f

Anggaran Dialihkan untuk Padat Karya

PENGASIH (KR) - Anggaran pengerjaan proyek pembangunan jalan bawah tanah Kemiri tahap kedua dialihkan Pemkab Kulonprogo untuk program padat karya dan pembangunan infrastruktur lainnya dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

"Dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa kebijakan belanja daerah fokus pada sejumlah hal yang salah satunya adalah penambahan belanja hibah untuk kegiatan padat karya. Pemilihan padat karya sebagai program prioritas bertujuan memulihkan ekonomi masyarakat yang terpuruk imbas pandemi Covid-19," papar Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo pada penyampaian nota keuangan dan raporda perubahan APBD 2020 di Ruang Kresna DPRD setempat, kemarin.

Program padat karya, dikatakan Sutedjo, selain melanjutkan pembangunan

infrastruktur yang tertunda karena pandemi, masyarakat utamanya yang terlibat langsung dalam proses kegiatan tersebut bakal mendapat tambahan penghasilan. Diharapkan ini bisa membantu perekonomian masyarakat.

Sutedjo optimistis, rencana pemkab memasukkan padat karya sebagai program prioritas dalam APBD perubahan bisa disetujui DPRD Kulonprogo. Rencana ini sudah sesuai dengan keinginan dewan, sehingga tinggal menunggu penatapannya saja.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nurwati mengatakan pribadi ia mendukung rencana itu, karena tujuannya jelas yaitu membangkitkan kembali perekonomian masyarakat selama wabah Korona. Ini juga sudah sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat pemma di seluruh Indonesia dalam merancang APBD perubahan fokus pada recovery bidang perekonomian. (Wid)-f

CSR BANK BRI DI PANTAI WIDODAREN

Bangun Infrastruktur, Tingkatkan Ekonomi Masyarakat



KR-Dedy EW

Penyerahan dan peresmian CSR Bank BRI.

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos meresmikan pembangunan sarana infrastruktur Corporate Social Responsibility PT Bank BRI di Pantai Widodaren, Kanigoro, Saptosari, Rabu (26/8) lalu. Program CSR membangun sarana diantaranya jalan, kios, sumur bor, jaringan telekomunikasi, tenaga surya dan masih banyak lainnya. "Pemkab memberikan apresiasi kepada Bank BRI, karena peduli membangun sarana

umum. Akses jalan yang semakin mudah dan fasilitas lengkap, pantai ini akan menjadi tujuan wisata, sehingga ekonomi masyarakat meningkat," kata Hj Badingah SSos. Kegiatan dihadiri Wakil Pemimpin Bank BRI Yogyakarta Joko Sudarmo, Pemimpin Cabang (Pinca) BRI Wonosari Yudo Uto-mo, Penewu Saptosari Jarot Hadiatmojo, Lurah Kanigoro dan masyarakat.

Joko Sudarmo mengungkapkan, CSR merupakan bentuk tanggung

jawab BRI kepada masyarakat. Pembangunan sarana prasarana diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga meningkatkan ekonomi. Dibangunnya kios, jalan, tenaga surya dan yang lain mendorong Pantai Widodaren menjadi tujuan wisata. "Selain di Widodaren, CSR BRI telah menasar berbagai tempat di antaranya Goa Pindul, air minum di Semanu dan masih banyak lainnya," ujarnya. Joko menambahkan, BRI berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui sarana prasarana yang dibangun, jangka panjangnya akan dirasakan. Semakin banyaknya wisatawan, Pantai Widodaren menjadi maju. "Bank BRI juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui akses layanan kredit, untuk meningkatkan usaha," ujarnya. (Ded)-f